PERLINDUNGAN HUKUM HARTA BAWAAN DEBITUR PASCA PERCERAIAN

Oleh

Puspa Fitriyah

Pascasarjana Kenotariatan Universitas Jayabaya

E-mail: puspaapitriyah@gmail.com

Article History:

Received: 07-10-2021

Revised: 16-11-2021

Accepted: 20-11-2021

Keywords:

Pertanggungjawaban
Hukum, Utang, Kreditor,
Isteri

Abstract: Masalah utang termasuk dalam bidang status personal, dimana perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang akibat hukum utang menjadi beban yang ditanggung bersama dari perkawinan perjanjian antar warga negara terutama terkait pembagian harta bersama. Mengenai perjanjian kawin tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Dari hasil penelitian Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan apada penurunan nilai appraisal oleh bank namun pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah atau debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan yang disertai oleh putusan hakim maupun atas kehendak dari salah satu pihak baik suami istri melalui pengajuan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa antara kedua mempelai yang menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia menurut KUH Perdata perkawinan hanyalah sebatas ikatan keperdataan saja. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas, harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu: 1). Harta bawaan suami atau istri dimaksud dengan harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Terkait dengan harta bawaan juga mengatur bahwa setelah adanya perkawinan, suami istri tetap memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau istri. 2). Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Dalam penguasaan dan pengurusan harta bersama ini, baik suami maupun istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. [1]

Perkawinan Perjanjian telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (*residence*) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan perjanjian. Sebagai bentuk keabsahan perjanjian perkawinan perlu juga memperhatikan aspek dari segi: (1) untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa karena akibat perjanjian ini akan ditanggung seumur hidup; (2) untuk kepastian hukum; (3) sebagai satu-satunya alat bukti sah; dan (4) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas Pasal 149 KUHPerdata.

Perkawinan perjanjian demikian adalah perkawinan perjanjian yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarga negaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang. Undang-undang pokok yang digunakan sebagai dasar untuk membuat perjanjian perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan terakhir mengenai perjanjian perkawinan diluar Undang-Undang pokok tersebut adalah Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menindak lanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan. [1]

Kebanyakan orang menganggap pembuatan perjanjian perkawinan tidak perlu dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil, hanya sebatas akta notaris saja dirasa cukup. Jadi bagi pasangan yang belum membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum

perkawinan, dapat membuat dan mengajukan perjanjian perkawinan ketika perkawinan sudah berlangsung. Padahal perjanjian perkawinan perlu dicatatkan ke Kantor Pencatat Perkawinan karena beberapa alasan. Perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan Undang-undang. [2]

Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Kesepakatan yang dibuat suami istri tersebut dinamakan perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terutama perihal harta kekayaan. Mengenai perjanjian kawin tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian kawin dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing. Apabila pasangan suami istri terlanjur tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan, maka permasalahan akan timbul jika terjadi utang terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan beban utang yang ditanggung. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada terdapat utang maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban, maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. [3]

Harta kekayaan tersebut dihasilkan selama perkawinan, sehingga harta kekayaan tersebut menjadi harta bersama. Keduanya tidak membawa harta bawaan yaitu harta yang dihasilkan sebelum perkawinan dan sebelum perkawinan dilangsungkan, keduanya juga tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan. Sehingga permasalahan baru muncul mengenai pembagian harta bersama tersebut, mengingat kewarganegaraan mereka berbeda, yang otomatis hukum mengenai pembagian harta bersama juga berbeda.

Ditambah lagi peraturan Perundang-undangan yang dimiliki negara Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai pembagian harta bersama pasangan yang berbeda kewarganegaraan, melainkan hanya mengatur pembagian harta menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkaitan dengan uraian dan gambaran kasus dari perkawinan perjanjian antar warga negara yang saat ini telah menjadi tren dikalangan masyarakat baik kelas bawah maupun kelas atas, maka perlu diadakan penelitian secara normatif yang dikaji dari bahan hukum primer dan sekunder mengenai akibat hukum utang menjadi beban yang ditanggung bersama dari perkawinan perjanjian antar warga negara terutama terkait pembagian harta bersama. [4]

Masalah harta perkawinan perjanjian ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut

ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami, oleh karena sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan, GHR tersebut tidak berlaku, maka sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam sistem perkawinan seperti perkawinan perjanjian dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Kemudian dari pada perkawinan perjanjian akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda. Pada masa berlakunya GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*) Stb.1898 Nomor . untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. [5]

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan baik itu mengenai harta atau lainnya. Namun dalam praktiknya di masyarakat perjanjian antara suami isteri sebelum menikah masih jarang ditemui, apalagi terkait dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak, hal ini sebagian besar masyarakat masih menganggap sebagai sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.

Ketentuan didalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Selanjutnya terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta asal dari masing-masing suami isteri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa jenis harta dalam perkawinan yang masing-masing terpisah. Ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian kawin.

Perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat(2), dan ayat(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perubahan norma tersebut tentu saja menimbulkan berbagai aspek hukum yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya oleh para akademisi yang harus merubah cara pandang terhadap pergeseran norma.

Apabila oleh suami-isteri dibuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga

tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal tersebut terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank. [6]

Terhadap Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan, ada 2 frasa yang ditambahkan oleh MKRI, yaitu “dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya” dan “atau mencabut/pencabutan”. Menariknya, pertimbangan yang diberikan oleh MKRI sehubungan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan hanyalah “frasa” ‘selama perkawinan berlangsung’ dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.”

Melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, MKRI mengubah 3 dari 5 karakteristik di atas, yaitu mengenai masa pembuatan, mulai berlaku dan sebab berakhirnya. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan pasca-Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan perjanjian yang benar-benar berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan sebelum Putusan Nomor. 69/PUU-XIII/2015. Sederhananya, perjanjian perkawinan yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement*, kini menjadi *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*.

Gambaran kasus yang berkembang pada masyarakat terutama terkait perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai, misalnya: bahwa perihal inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ketentuan yang memunculkan perperjanjian harta tidak lagi relevan untuk dibahas karena perjanjian perkawinan yang bisa memunculkan pemisahan harta bisa dibuat kapan pun, selama dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, MKRI menggunakan konstruksi *argumentum a contrario* guna mencapai kesimpulan perihal konstitusionalitas perperjanjian harta tanpa perkecualian dalam perkawinan.

Pembagian harta campur yang lebih besar kepada salah satu pihak, misalnya isteri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan suami $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, Pembagian tersebut berarti telah terjadi pergeseran harta diantara suami istri yang dapat digolongkan sebagai hibah, sedangkan hibah diantara suami istri selama perkawinan dilarang undang-undang, kecuali hadiah atau pemberian benda bergerak bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan penghibah (Pasal 1678 KUHPerd);

Menurut doktrin membagikan dan memisahkan harta perkawinan tidak dapat dilakukan atas persetujuan bersama karena tidak adanya alasan untuk melakukannya berkaitan dengan pemilikan bersama yang terikat. Pemilikan bersama yang terikat baru dapat diakhiri karena meninggalnya suami atau isteri atau perceraian suami isteri. Tidak dapat diperjanjikan, bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan, batal demi hukum.

Untuk perjanjian perkawinan yang dinyatakan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sebaiknya dibuat daftar harta mana yang telah dimiliki sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan yang ditandatangani suami-isteri dan dilekatkan pada minuta; Apabila pencantuman atas benda tidak dicantumkan dalam minuta maka atas penambahan benda yang ternyata diluar pengetahuan pihak yang bersangkutan dapat dibuktikan dengan cara lainnya. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai

kepemilikan atas benda yang tidak dapat dibuktikan tersebut, akan dianggap sebagai milik para pihak masing-masing untuk bagian yang sama besar. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan para kreditor dari pasangan tersebut. Ada kemungkinan diperjanjikan berlakunya perjanjian perkawinan dengan ketentuan bersyarat baik dengan syarat menanggguhkan atau dengan syarat membatalkan demikian pula dengan ketetapan waktu atau termin. [7]

Syarat menanggguhkan bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikata (Pasal 1253 KUHPerd). Ketetapan waktu tidak menanggguhkan perikatan, melainkan hanya menanggguhkan pelaksanaannya dan memberi kepastian kepada pihak ketiga bahwa prestasi pasti akan dilakukan pada waktu yang telah dijanjikan (Pasal 1268 KUHPerd). Misalnya, perjanjian perkawinan berlaku apabila telah dilahirkan seorang anak.

Menurut pendapat Van Den Burght demikian juga **Asser-De Boer**, ketentuan demikian daya kerjanya terhadap pihak ketiga menimbulkan ketidak pastian sehingga harus dianggap bahwa perjanjian perkawinan tersebut batal, sedangkan daya kerja internal antara suami istri dapat berlaku sebagai perjanjian obligatoir. Perjanjian perkawinan tidak boleh menunjuk berlakunya perundang-undangan asing sebagai pilihan hukumnya, melainkan mengurangi segala hak disandarkan pada kekuasaan suami dan kekuasaan orang tua, juga hak yang diberikan undang-undang kepada suami-isteri yang hidup terlama. Tidak boleh melepaskan hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam bentuk otentik terkait semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diatur oleh peraturan Undang-Undang atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Dikatakan ketentuan yang ada pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan tidak semata-mata hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan itu saja, melainkan juga terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan. Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga.

Menambahkan peran atas kewenangan Notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat terutama dikalangan para Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku juga bagi pihak ketiga.

Perspektif hukum Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan

peranan mengatur tentang harta benda perkawinan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, Perjanjian perkawinan dalam arti formal adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, dan tidak dipermasalahkan apapun isinya.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga merupakan cara untuk menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, calon suami dan calon istri berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian secara tertulis yang selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan, dimana dengan ditandatanganinya perjanjian perkawinan tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan utang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki utang tersebut. [8]

Berdasarkan perluasan antar permasalahan *dassein* dan *dassolen* diatas dalam penelitian tesis ini maka terdapat permasalahan tentang penerapan perjanjian perkawinan terhadap utang yang ditanggung setelah salah satu pasangan suami isteri sudah tidak lagi merupakan pasangan yang memiliki hubungan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap rumusan perjanjian perkawinan utang yang akan ditanggung oleh suami atau isteri. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum utang debitur terhadap kreditur dalam masa akhir perkawinan? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bawaan debitur?

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara. Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan. [9]

Menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif . Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk

penanganannya dilembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Unsur-nsur yang tercantum dalam definisi teori Perlindungan Hukum meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Dalam status Anak pungut yang memerlukan teori Perlindungan Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian, agar satu sama lain tidak ada yang merasa tidak terlindungi hak-hak hukumnya. Sehingga apa yang menjadi sengketa mendapatkan titik terangnya.

2. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab atas perbuatan terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila unsur terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.

Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional. sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya

upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional. system hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Disini, hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. di dalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku Undang-undang Perkawinan Nomo 1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif didukung secara wawancara oleh narasumber. Artinya, penelitian hukum tersebut dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai. Dalam konteks penelitian terhadap efektivitas hukum dibahas mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat.

Dalam konteks efektivitas hukum diteliti bahwa hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literature-literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses penerapan hukum di dalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara *das sein* dan *das solen*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

Senada dengan hal tersebut, Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa penelitian hukum non doctrinal merupakan penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila tidak menguasai metodenya. Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.

1. Pendekatan Penelitian

Melakukan Penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di cari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis Normatif didukung yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung dari objeknya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Fakta adalah pendekatan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat dari data-data yang ada di lapangan terutama berkaitan dengan akibat hukum penerbitan sertifikat yang cacat materil. Kemudian pendekatan analisis konsep hukum dimaksudkan untuk memahami konsep-konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah. [10]

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini mengklasifikasikan mengenai akibat hukum atas kepastian hukum terhadap implikasi hokum *post-prenuptial agreement* perkawinan pasca putusan MK Nomor 69/puu-xiii/2015 terhadap utang yang akan menanggung.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hokum empiris didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer atau dikenal juga dengan nama data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Adapun data Primer berdasarkan atas data diperoleh di masyarakat yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dengan kondisi yang ada di masyarakat. Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan yang akan dilakukan oleh Penegakan hukum. Baik berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun beberapa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini jenis data dibedakan menjadi dua, yakni: [11]

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau

pendapat pakar hukum. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa : [12]

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Kompilasi Hukum Islam;
- g. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- i. Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil
- j. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan.
- k. Putusan perkara nomor Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Jmb

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan Teknik Wawancara/interview dan Teknik Studi Dokumen. Adapun Teknik Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan teknik studi dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Dalam penelitian ini, penempatan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data penelitian dilingkup Notaris serta Perpustakaan Universitas Jayabaya, Perpustakaan Nasional.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan permasalahan terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan dengan menganalisis data yang didapat dikaitkan dengan teori-teori dalam landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan tersusun untuk merampungkan tulisan ini. [13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban hukum utang debitur terhadap kreditur dalam masa akhir perkawinan

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada

kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah *Loan to Value Ratio*.

Secara Yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa lainnya seperti kredit.

Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan apada penurunan nilai appraisal oleh bank namun pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah atau debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank, menjadikan barang tidak bergerak yang berupa tanah (hak atas tanah dan bangunan) berikut yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan tanpa debitur menyerahkan barang jaminan tersebut secara fisik kepada kreditur (bank), artinya barang jaminan tersebut secara fisik tetap dikuasai oleh orang yang bersangkutan dan kepemilikannya tetap berada pada pemilik semula, tetapi karena dijadikan jaminan utang dengan diadakannya perjanjian hak tanggungan sehingga kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melaksanakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau perbuatan lain yang mengakibatkan turunnya nilai jaminan itu dibatasi dengan hak tanggungan yang dimiliki oleh bank sebagai pemegang hak tanggungan tersebut.

Pada Wawancara Notaris Eva Junaida, bahwa Apabila pada hari pertama gugatan diterima maka penyitaan akan dilanjutkan, sebaliknya apabila gugatan ditolak maka sita akan diangkat. Pada prakteknya permohonan sita marital pada umumnya diajukan bersamasama dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan permohonan sita diajukan pada sebelum atau pada pertengahan proses pemeriksaan perkara. Pada kenyataannya Pasal 227 ayat (1) HIR juga memberikan kemungkinan bahwa sita marital dapat dimohonkan sesudah adanya putusan tapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Contoh permohonan ini adalah dalam hal telah dijatuhkan putusan verstek, dimana terhadap putusan verstek tersebut tergugat masih mengajukan perlawanan, atau dalam hal telah dijatuhkan putusan *contradictoir* sedangkan yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Debitur

Seiring berjalannya waktu banyaknya jumlah uang yang dipinjam tidak mampu dibayar oleh debitur termasuk juga karena harta bersama tersebut yang mereka miliki

tidak mencukupi untuk membayar utang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dilakukan proses pengikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri Tergugat I dan Tergugat II (RANDI PRADANA HAMIDI & EMI YANTI). Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dapat dilihat dalam landasan konstitusional Indonesia yaitu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara Kepada Hakim Dra. Hj. Hafsa bahwa Cara yang ditempuh adalah penggugat langsung menghadap Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, kemudian penggugat menceritakan duduk persoalan perkaranya dengan jelas dan menyampaikan hal-hal yang diminta / digugat untuk diputuskan oleh pengadilan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut akan mendengarkan dengan seksama semua penjelasan penggugat dan mencatatnya dalam bentuk Catatan Gugatan Lisan yang dirumuskan dengan sistematika tertentu dan kemudian Catatan Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang ditunjuk. Catatan Gugatan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut berfungsi sebagai pengganti gugatan tertulis bagi Penggugat yang buta huruf.

Di dalam suatu ikatan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar kadangkala pasangan dalam perkawinan tersebut menemukan permasalahan yang begitu rumit yang tidak mudah diselesaikan oleh keduanya. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak selalu didapatkan karena untuk menjaga keharmonisan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Kerumitan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tidak kunjung menemukan jalan terang maka membuat hubungan rumah tangga tersebut semakin pudar hingga sampailah pada titik perceraian. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang abadi tujuan material, yakni membentuk rumah tangga dan pula keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum islam tidak terdapat istilah perkawinan, melainkan dikenal istilah pernikahan.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat Tanggungjawab hukum Bentuk pertanggungjawaban hukum dari Persepsi eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, merupakan langkah progresif khususnya bagi Undang-Undang Hukum Keluarga di Indonesia. yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.
2. Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan pada penurunan nilai appraisal oleh bank namun

pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank, menjadikan barang tidak bergerak yang berupa tanah terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya yang berkaitan dengan tanah. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya sebagai penulis dalam artikel ini pertama-tama mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pembimbing I Dr.Zulkarnaen Koto, SH, MH. Dan Pembimbing II Dr. Maryano, SH., CN., MH., yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan waktu yang sangat berharga serta kepada Kaprodi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Dr. H. Yuhelson, SH., MH., M.Kn. yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dilingkungan institusi yang dimuliakan. Untuk segenap rekan-rekan mahasiswa/I yang saya banggakan atas doa dan dukungan selama ini sehingga saya bisa menjadi seperti ini dan dukungan kepada kedua orang tua dan saudara-saudara yang tidak dapat disebut seluruhnya namun rasa sayang dan perhatian sudah mewakili untuk saya bisa berjuang dan bersemangat menyelesaikan studi dengan baik dan maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- [1] I. Hosen, "Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan," in 1, Jakarta, PT.Pustaka Firdaus, 2003, p. 272.
- [2] Ismuha, "Pencarian Harta Bersama Suami istri," Jakarta, Bulan Bintang, 1965, p. 16.
- [3] H.M.Anshary, "Hukum Perkawinan di Indonesia," Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, p. 120.
- [4] H. Poerwosutjipto, "Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran," Jakarta, Djambatan, 1992.
- [5] W. S. P. Handoko, "Akibat Hukum Bagi Kreditur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat Dan Telah Disahkan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, p. 56, 2021.
- [6] L. W. & H. Nurdiyanawati, "Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 1, p. 107, 2019.
- [7] E. Paramita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan," *Jurnal Repertorium*, vol. 4, no. 2, p. 34, 2017.
- [8] J. M. Saragih, "Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 1, p. 12, 2017.
- [9] P. M. Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, p. 37.
- [10] A. d. Z. Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, p. 20.
- [11] B. Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," Jakarta, Raja Grafindo, 2012, p. 42.

- [12] S. S. d. S. Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif," Jakarta, Raja Grafindo, 2013, p. 12.
- [13] J. A. d. A. Safaat, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, p. 61.
- [14] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".